

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENJAGA PERSATUAN INDONESIA**

**Hariyanti<sup>1</sup>, Gigieh Cahya Permady<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Riau

<sup>2</sup>Politeknik Pelayaran Sorong, Papua

[hariyanti@lecturer.unri.ac.id](mailto:hariyanti@lecturer.unri.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai posisi dan model Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebhinnekaan dalam menjaga persatuan Indonesia. Artikel ini menggunakan metode literature review dalam menganalisis masalah dan berupa mengemukakan upaya mengatasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sejumlah literature baik buku, berita di media massa maupun hasil penelitian terkait. Temuan penelitian menemukan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk terdiri dari keberagaman dari segi Bahasa, agama, suku, budaya yang tentu mempengaruhi cara pandang, pola pikir, dan perilakunya. Jika tidak disikapi dengan baik maka akan mudah memantik konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan Pendidikan kewarganegaraan dari segi Solusi edukasi kepada Masyarakat sejak dini sedari di bangku persekolahan untuk mengenal dan menghargai perbedaan yang ada. Kesadaran akan keberagaman perlu ditekankan sejak dini untuk menghindari sentiment primordial dan sukuisme. Model Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai kebhinnekaan terdiri dari strategi, materi dan media yang diharapkan dapat memupuk rasa persatuan di Tengah perbedaan yang terbentang di Masyarakat.

### **ABSTRACT**

*This article aims to describe the position and model of citizenship education as a means of infiltrating the values of diversity in maintaining the unity of Indonesia. This article uses the literature review method to analyze problems and propose efforts to overcome them. Data collection was carried out through searching a number of literature, including books, news in the mass media and related research results. The research findings found that Indonesia is a pluralistic country consisting of diversity in terms of language, religion, ethnicity, culture which of course influences perspectives, thought patterns and behavior. If it is not handled well, it will easily trigger social conflict. Therefore, citizenship education is needed in terms of educational solutions for the community from an early age from school to recognize and appreciate existing differences. Awareness of diversity needs to be emphasized from an early age to avoid primordial sentiment and tribalism. The citizenship education model as a means of infiltrating the values of diversity consists of strategies, materials and media which are expected to foster a sense of unity amidst the differences that exist in society.*

### **Kata kunci:**

Pendidikan Kewarganegaraan,  
Pendidikan Multikultural,  
Persatuan Indonesia

### **Keywords:**

Civic education; Multicultural  
Education; the unity of Indonesia

## Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, dalam artian Masyarakat Indonesia terdiri dari keberagaman suku, budaya, Bahasa, agama hingga berujung pada perbedaan pola pikir, kebiasaan dan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan hidup dan budayanya. (Hariyanti, 2022). Oleh karena itu, Masyarakat Indonesia tidak dapat digeneralisasikan karena memiliki keunikan masing-masing (Sartika, 2011). Menurut Prof Dasim budimansyah dalam buku teori sosial dan kewarganegaraan (2016) kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya dua ciri yang utama yakni *Pertama* adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat serta perbedaan kedaerahan. *Kedua*, secara vertical. Ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertical antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Namun, diatas semua kemajemukan itu, ada satu hal yang berusaha diwujudkan untuk menjaga kesatuan yaitu toleransi. Toleransi lazim dimaknai sebagai kesediaan mengizinkan orang lain untuk berpikir, berbicara dan bertindak dengan cara-cara yang tidak disetujui atau tidak biasa bagi orang lain. tapi ingat menurut Fredi Kalijerni (2011) dalam buku Puspa Ragam Kewarganegaraan bahwa toleransi itu ada batasnya yakni ketika ia menjadi *kesesif* atau bersifat merugikan orang lain. Toleransi adalah kunci dari kedamaian dalam pola Masyarakat multicultural (Muhammad Anas, 2019), agar tidak mudah terpancing dengan konflik sosial seperti konflik suku, perasaan primordial hingga Gerakan radikalisme dan terorisme (Aminah, 2016).

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan multicultural, bangsa ini dapat terus bersatu sampai sekarang selama segenap anak bangsa yang beragam ini “tahu diri” akan kapasitasnya masing-masing. Prof Idrus Affandi (2016) dalam buku Mereformasi Reformasi menyatakan bahwa negeri ini sangat plural namun secara simple pluralitas itu dapat dikategorikan dalam religiusitas, lokalitas dan modernitas. Saat dalam masa penjajahan Indonesia berada di bawah kekuasaan modern belanda kemudian jepang. Tapi nilai lokalitas Indonesia nihil, peran nilai religiusitas juga kecil. Religiusitas pada masa belanda dibatasi hanya pada ranah ritual. Tidak diberlakukan pada ranah sosial (menanti stabilitas yang ideal). Pluralitas di Indonesia dalam beberapa segi cukup sensitive dan mudah dibenturkan jika tidak disikapi dengan baik. Bara konflik biasanya mudah berkobar jika telah berurusan dengan persoalan seputar agama/religiusitas/Persoalan keyakinan. Historisitas konflik di Indonesia relative banyak menarik persoalan ini karena sifatnya yang sensitive, begitu mudah menggugah emosi dan menimbulkan jiwa pengorbanan bagi pemeluk-pemeluknya karena menyangkut hal yang transedental. Peristiwa 4 November 2016 yang berlanjut dengan aksi 2 Desember 2016 merupakan contoh dari hal tersebut. Aksi ini bukanlah gambaran dari sikap intoleran umat islam Indonesia tetapi harus diingat bahwa akidah atau keyakinan bersifat sakral bagi pemeluknya karena bersifat transedental, ketika wilayah itu dicampuri bahkan dinistakan oleh orang lain maka *chaos* dapat saja terjadi, seperti pernyataan Prof Idrus Affandi (2016) dalam sebuah artikel di Harian Pikiran Rakyat bahwa “kasus dugaan penistaan agama yang di lakukan ahok hanyalah trigger atau pemicu”. Telah ada preseden serupa seperti kasus kekerasan interumat beragama di Sampang Madura, pembakaran Gereja di Tolikara Papua, kasus kekerasan agama dan politik di Poso hingga kasus kekerasan etnik di Lampung. Mari kita jadikan keragaman ini sebagai kekuatan dan kelebihan kita, justru ini adalah anugerah dan keunikan bangsa Indonesia.

Kemajemukan tersebut jika tidak disikapi dengan baik maka akan berujung pada konflik dan disintegrasi bangsa (Shofa, 2016), diperlukan hal-hal yang mempersatukan dan memperkuat semangat untuk tetap berada di dalam satu lingkup Negara Kesatuan Republik Indoensia tanpa menghilangkan ciri khas/identitas masing-masing kebudayaan daerah. Menurut Frans Magnis Suseno (2009) dalam buku Etika Kebangsaan dan Etika Kemanusiaan, yang mempersatukan Indonesia adalah kesadaran sebagai satu bangsa dan ini bukan sesuatu yang alami melainkan tekad

untuk bersama yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bersama. Sejarah penderitaan dan penindasan mencapai kemerdekaan. Kalau semangat dan tekad ini menguap maka yang tersisa hanya kelompok-kelompok etnik. Tidak ada lagi negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yudi Latif di dalam buku Negara Paripurna (2016) bahwa Indonesia telah memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. 350 tahun dijajah oleh belanda dan 3,5 tahun ditindas oleh jepang bukanlah waktu yang sebentar untuk menderita dan dijadikan manusia kedua di tanah airnya sendiri. Kemerdekaan dan persatuan yang telah diperjuangkan oleh para *the founding father and mother* negeri ini, tidak boleh dicabik-cabik dengan ego kedaerahan dan kepentingan kita masing-masing (Siregar, 2014).

Menurut Ernest Renant pada 11 Maret 1882, bangsa adalah jiwa, bangsa adalah suatu kesatuan asas kerohanian yang timbul dari (1) kemuliaan serta kesengsaraan bersama di waktu lampau yang merupakan aspek historis; (2) keinginan untuk hidup bersama diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas. Syarat mutlak adanya sebuah bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan suatu persetujuan bersama pada waktu sekarang yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Persetujuan bersama atau *consensus* nasional inilah adalah apa yang kita kenal dengan pancasila dan UUD 1945. Prof Idrus Affandi (2016) menguatkan hal ini dengan mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan yang sering memunculkan gesekan yang menjurus pada disintegrasi bangsa harus diselesaikan dengan berpedoman kepada apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa yakni berpedoman kepada pancasila dan UUD 1945 sebab keduanya secara historis telah teruji mampu menjembatani berbagai perbedaan, termasuk perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dinamika sosial adalah kelaziman yang tidak harus dihindari. Keduanya merupakan aspek utama dalam pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang harus dipahami, dihayati dan dicerna serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari (*civic skill*) sebagai dasar negara dan peraturan tertinggi dalam negara indonesia. Keduanya harus menjadi pedoman dalam bertindak dan menjadi ciri khas/identitas (*civic disposition*) sebagai warga negara indonesia yang toleran, tenggang rasa, dan berjiwa demokratis.

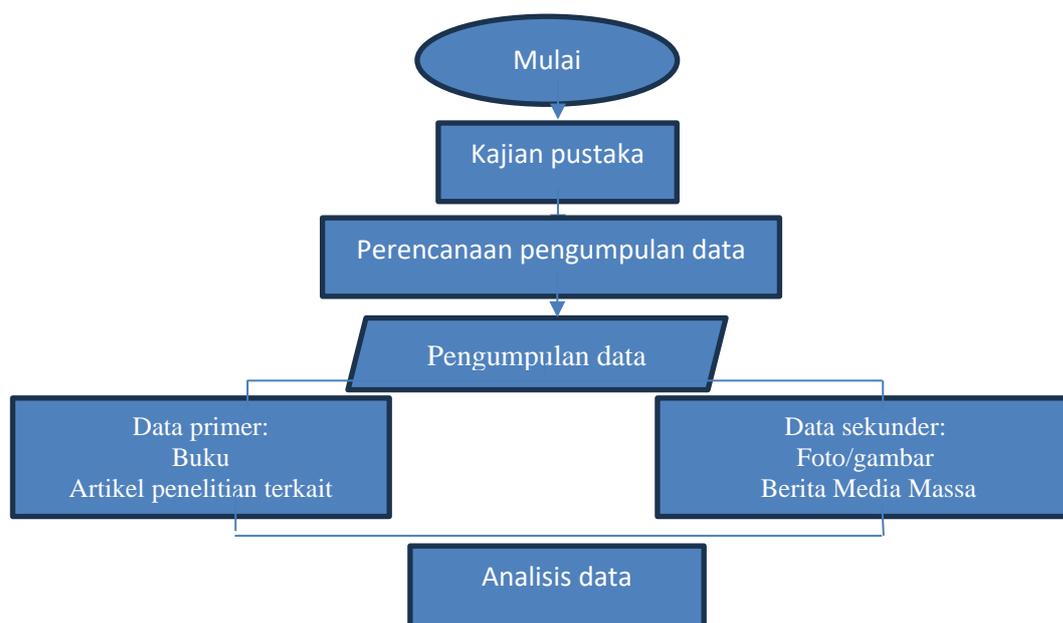
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara material berasal dari kebudayaan bangsa. Hal yang sama pernah diungkapkan oleh Soekarno bahwa ia bukanlah pencipta dari sila-sila Pancasila melainkan ia hanya menggali bulir-bulir mutiara yang telah ada dalam kebudayaan bangsa indonesia, yang ia susun dan dirumuskan menjadi sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila merupakan pencerminan dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideology negara merupakan ciri khas/identitas indonesia dimata dunia (Kardiman et al., 2020). Sebagai ideology negara, Pancasila memberikan orientasi dan wawasan, asas sekaligus pedoman yang normative dalam seluruh bidang kehidupan negara. Dari sisi cultural, dasar-dasar pemikiran dan orientasi Pancasila pada hakikatnya bertumpu pada kebudayaan bangsa. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya baik tradisional maupun modern (Cindy Adam:1960;Soerjanto Poespowardjojo:1989).

Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 harus dituangkan dalam semua bidang kehidupan yakni sosial, ekonomi, budaya, politik, hankam serta pendidikan. Pancasila merupakan *consensus* nasional yang mempersatukan kemajemukan di Indonesia (Mughtar & Iswandi, 2018). nilai-nilai kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air indonesia harus diinternalisasikan dalam diri seluruh anak bangsa. Artinya diperlukan rangkaian upaya edukatif yang intensional, terarah, dan sistematis untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara dalam menjunjung kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional dalam

bernegara (Ahmad Eddison, Hambali, 2020). Negara kebangsaan majemuk seperti Indonesia hanya bisa bertahan kalau kemajemukan itu dihormati. Rasa kebangsaan Indonesia memang harus senantiasa dipupuk dan ditumbuh suburkan, salah satunya melalui sarana pendidikan (Pakpahan et al., 2021) sebab rasa kebangsaan bukan sesuatu yang alami. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan kewarganegaraan (PKn) politik kepada semua anak bangsa. PKn ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas, namun untuk membentuknya diperlukan jalur pendidikan formal dengan cara-cara yang edukatif seperti yang pernah diungkapkan Thomas Jefferson bahwa *“pengetahuan, keterampilan dan perilaku warga negara yang demokratis tidak muncul secara alamiah tetapi harus diajarkan di bangku persekolahan kepada setiap generasi”*. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengelaborasi lebih lanjut posisi Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari Pendidikan multicultural yang diharapkan akan menumbuhkan kesadaran akan perbedaan, menerimanya sebagai sebuah kenyataan sosial dan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga menumbuhkan *sense of belonging* yang kuat dari warga negara terhadap bangsa dan negara ini, selain itu juga ditawarkan model Pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari strategi, materi, media yang dapat digunakan di jalur Pendidikan formal untuk menumbuhkan kebanggaan rasa persatuan ditengah keberagaman yang terbentang di Masyarakat. Adapun kebaruan dari penelitian ini justru terletak pada tawaran model Pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan multikultural sebab penelitian PKn dalam konteks multikultural umumnya hanya membahas dan mengeksplorasi mengenai multikulturalisme di Indonesia yang harus diperkenalkan kepada kepada peserta didik tanpa Langkah konkret untuk melakukannya di ruang kelas.

## Metode

Tulisan ini menggunakan metode kajian literatur berupa teori-teori dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Metode kajian literature merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan tema dilakukan secara deskriptif dan selanjutnya menghasilkan kesimpulan yang bersifat induktif.





Gambar 1: Diagram Alir Penelitian

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Bagian dari Pendidikan Multikultural**

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*). Prof Numan somantri (2001) melukiskan warga negara yang baik adalah warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap cita negara, Beragama, demokratis, pancasilais. Sedangkan Prof Abdul Azis Wahab (1996) mengidentifikasi warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu warga negara, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya (*socially sensitive, responsible, and socially intelligence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior and desirable personal qualities*). Lebih lanjut warga negara yang baik adalah warga negara yang mematuhi dan melaksanakan hukum serta aturan dan peraturan perundang-undangan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari air dan udara di sekitarnya serta memelihara dan memanfaatkan lingkungannya secara bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner/multidisipliner/ multidimensional. Sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Namun, secara filsafat keilmuan bidang studi ini memiliki bidang kajian pokok ilmu politik khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk aspek hak dan kewajiban (Winarno, 2013; Winataputra, 2016). Prof numan somantri (2001) menyatakan bahwa objek studi civics dan civic education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan dan negara. Kata kunci dari pengertian ini adalah warga negara dalam hubungannya dengan pihak lain yang dimaksud adalah negara. Hal ini sejalan dengan kajian yang telah dilakukan terdahulu bahwa pada hakekatnya objek kajian PKn adalah perilaku warga negara (Prof Sapriya,2007). Ontology PKn yang essensial adalah perilaku warga negara. Dilihat dari fenomena PKn sebagai kajian perilaku warga negara maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telaahnya begitu luas. Kajian yang berpusat pada perilaku warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik.

Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologis, sosial, politik, normative, antropologis dan dimensi lain sehingga dapat dinyatakan

dengan sifat multidimensional. Keberadaan negara bersifat dinamis dan dapat berkembang. Keberadaan bangsa dan negara Indonesia merdeka yang multi-etnis dan multi-karakter merupakan aspek sosiologis dan psikologis-historis sebagai kajian ontologi PKn yang dapat dijadikan untuk pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku warga negara yang mendukung bagi pembangunan bangsa. Aspek emosional seperti rasa kebangsaan (*nationalism*) dan cinta tanah air (*patriotism*) bahkan dengan mengetahui dan memahami diri secara sosiologis dan historis akan dapat membangun kesadaran diri sebagai warga negara. Keberadaan PKn sangatlah penting pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah Sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn (Khoiri et al., 2017). Secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Chotimah et al., 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan perbedaan menonjol dari segi ras, agama, bahasa dan suku bangsa. Inilah yang menjadi potensi terjadinya disintegrasi jika di dalam setiap diri warga negara tidak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nasionalisme dan kekhasan keberagaman yang terdapat di Indonesia. Hal ini merupakan suatu anugerah dari Allah swt yang harus dijaga. Contohnya dari segi bahasa, bangsa Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah sebagai alat komunikasi masing-masing daerah tetapi semua itu dapat disatukan oleh bahasa Indonesia, bahkan hal yang luar biasa ketika perumusan bahasa persatuan adalah kelegowoan masyarakat Jawa sebagai penutur terbanyak di Indonesia ketika itu, bahwa bukan bahasa mereka yang dijadikan sebagai bahasa persatuan tetapi bahasa Melayu yang umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai pulau Sumatera. Hal ini menjadi satu kelebihan bangsa Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara majemuk lainnya seperti negara Afrika Selatan yang memiliki lebih dari satu bahasa nasional (Hariyanti et al., 2023). Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu wadah yang digunakan untuk menumbuhkan dan membentuk jiwa nasionalisme sejak dini melalui jenjang pendidikan, hal ini terlihat dari konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Maka juga dapat dikatakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari Pendidikan multikultural yang bertujuan untuk memperkenalkan perbedaan dan membuat warga negara menyadari akan perbedaan tersebut serta bagaimana memunculkan semangat menghargai dan saling menghormati. Konsep multikulturalisme yang menganjurkan menerima perbedaan sebagai sebuah kenyataan yang justru harus dilihat sebagai sebuah kekuatan sesuai dengan ideologi Pancasila maupun agama Islam yang mayoritas dianut Masyarakat Indonesia.

Pendidikan multikultural awalnya merupakan gerakan reformasi pendidikan di Amerika Serikat dalam rangka meniadakan (setidaknya mengurangi) diskriminasi rasial dan etnis serta kultur yang melekat padanya, dan berupaya agar semua orang bisa memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Diskriminasi rasial, etnisitas, dan kultural, bahkan gender sangat kental di Amerika Serikat, hingga saat ini. Pendidikan multikultural, yang mencuat di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an, itu merupakan suatu gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat “minoritas,” yaitu masyarakat yang berada di luar “*white-male-Protestant-Anglo Saxon (WMPA)*.” Gerakan pendidikan multikultural adalah gerakan untuk mereformasi lembaga-lembaga pendidikan agar memberikan

peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk bisa berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya (Alim, 2019).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan multikultural bukan dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi dalam sektor pendidikan seperti yang terjadi di Amerika Serikat melainkan sebaliknya bertujuan untuk memperlambat dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan sosial yang ada dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman dan pluralitas yang hidup di Indonesia. Tujuan utama penerapan pendekatan pendidikan multikultural di tingkat nasional hendaknya dititikberatkan pada pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap budayanya sendiri dan budaya orang lain, mencakup agama, berlandaskan semboyan bhinneka tunggal ika serta Pancasila. Untuk itu maka diperlukan adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama dengan memasukkan muatan materi keanekaragaman nilai-budaya, didukung oleh penelitian sosiologis dan antropologis untuk pendidikan. Menurut Tatang M. Amirin (2010) konteks implementasinya di Indonesia, pendidikan multikultural dapat dilihat atau diposisikan sebagai berikut: (1) Sebagai falsafah pendidikan; yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (*berbarkat*) dan bahagia dunia akhirat; (2) Sebagai pendekatan pendidikan; yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu (pendidik dan peserta didik), dan akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antar individu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah (kurikulum, pedagogi dan faktor lainnya). Menurut Gorski, ada tiga tujuan utama pendidikan multikultural (yang boleh disebut sebagai sasaran instrumental dan terminal), yaitu: (1) meniadakan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental); (2) menjadikan anak bisa mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal); (3) menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural menggunakan pendekatan etnopedagogi artinya bagaimana pembelajaran di kelas mampu memperkuat budaya-budaya bangsa berbasis pada kearifan lokal. Etnopedagogi secara sederhana ialah pembelajaran berbasis etnik, baik yang digunakan sebagai sumber belajar maupun media pembelajaran. Etnopedagogi adalah aktualisasi pembelajaran terhadap penanaman nilai kearifan lokal suatu etnik. Etnopedagogi penting diterapkan di Indonesia karena negara Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari beragam budaya dan etnik. Dalam konteks pendidikan, etnopedagogi dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap yang benar terhadap nilai suatu budaya bangsa (Sugara & Sugito, 2022). Etnopedagogi adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang menawarkan sebuah konsep berbasis budaya atau persisnya kearifan lokal. Alwasilah (2008) menyatakan bahwa kearifan lokal adalah potensi yang mesti diberi tafsir baru agar fleksibel untuk menghadapi tantangan zaman. Kearifan lokal memiliki ciri berikut : (1) berdasarkan pengalaman; (2) teruji secara empiris selama bertahun-tahun; (3) dapat diadaptasi oleh budaya modern; (4) melekat dalam kehidupan pribadi dan institusi; (5) lazim dilakukan oleh individu dan kelompok; (6) bersifat dinamis; (7) terkait dengan sistem kepercayaan. Kearifan lokal adalah pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah yang bersifat parsial/lokal melalui pengalaman yang telah dialami kemudian dijadikan suatu

pengetahuan baru yang diwariskan kepada generasi selanjutnya artinya setiap kearifan lokal akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain karena ia merupakan hasil dari kecerdasan etnis pendukungnya (Fatmi et al., 2023). Etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal sebagai sumber inovasi dan keterampilan yang dapat diberdayakan demi kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal adalah fakta, konsep, kepercayaan dan persepsi masyarakat perkara hal ihwal dunia sekitar (Zuriah, 2012).

### **Model Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Sarana Infiltrasi Nilai-Nilai Kebhinnekaan.**

Menurut Freddy K. Kalidjernih (2010) pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan pengembangan karakteristik-karakteristik seorang warga negara melalui pengajaran tentang peraturan-peraturan dan institusi masyarakat dan negara. Empat aspek yang lazim menjadi perhatian utama pendidikan ini adalah hak dan kewajiban, tanggung-jawab-partisipasi dan identitas dalam relasi negara-warga negara dan warga negara-warga negara. PKn menjadi salah satu wadah yang digunakan untuk menumbuhkan dan membentuk jiwa nasionalisme sejak dini melalui jenjang pendidikan, hal ini terlihat dari konten kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam semua jenjang pendidikan. Hal ini dilakukan mengingat tujuan essensial dari PKn yakni untuk membentuk warga negara yang baik (*to be good citizenship*) (Nurhidayah et al., 2020).

Pendidikan multikultural merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah sebab Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai misi yang khas. Mata pelajaran ini menonjol dengan misinya untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan perbedaan menonjol dari segi ras, agama, bahasa dan suku bangsa. Inilah yang menjadi potensi terjadinya disintegrasi jika di dalam setiap diri warga negara tidak diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai nasionalisme dan kekhasan keberagaman yang terdapat di indonesia (Arta, 2021). Untuk mewujudkan PKn yang mampu membina peserta didik menjadi pribadi yang toleran terhadap perbedaan dan demokratis dalam menyikapinya serta meningkatkan rasa kebangsaan peserta didik di tengah-tengah perbedaan dalam hubungan sosial, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

#### 1. Strategi;

Strategi yang perlu dibangun adalah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait seperti pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan. contohnya, untuk mengenalkan nilai-nilai kebudayaan yang khas dari setiap daerah untuk meningkatkan kecintaan peserta didik dengan budaya dan tanah kelahirannya, guru PKn di sekolah ketika mengajarkan materi-materi yang terkait dengan hal tersebut dapat mengajak siswa untuk berkunjung ke museum-museum. Namun, kunjungan ini tidak perlu mengurangi bahkan mengganggu jam pelajaran PKn. Guru dapat menggunakan hari-hari yang sekiranya tidak mengganggu peserta didik dan kegiatan sekolah lainnya seperti pulang sekolah di hari jum'at, biasanya jam PBM dipersingkat dan kesempatan dapat dimanfaatkan oleh guru PKn yang dapat bekerjasama dengan guru mata pelajaran lainnya, tentunya dengan terlebih dahulu memberikan waktu untuk peserta didik laki-laki muslim mengerjakan sholat jum'at. Kegiatan kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan peserta didik dengan nilai-nilai kebudayaan lokal dan menanamkan rasa kecintaan terhadap keunikan tanah kelahiran masing-masing di tengah kemajemukan yang ada. Secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah

agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*), baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*civic responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

## 2. Metode dan Media;

Sekolah merupakan tempat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme karena sekolah mempunyai waktu, sarana dan prasarana serta tanggung jawab moral untuk mendidik dan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang cerdas secara kognitif, bermoral, demokratis serta menjadi pribadi yang toleran secara afektif, tangkas serta multitalenta secara psikomotor (Risdiyani & Anggraeni Dewi, 2021). Contohnya, guru dapat melakukan metode pembelajaran berbasis pemecahan masalah atau studi kasus konflik-konflik yang berbau SARA di Indonesia. Menurut penulis, diskusi seputar masalah SARA di Indonesia bukanlah sesuatu yang tabu dan dihindari melainkan harus diperkenalkan dan diberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai kemajemukan Indonesia karena konflik SARA umumnya dilatarbelakangi oleh sikap primordialisme yang picik dan stereotip yang kesemuanya ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan pengetahuan terhadap kemajemukan pada umumnya dan keunikan masing-masing budaya pada khususnya. Jika kesepahaman tercapai maka bukan tidak mungkin sikap toleransi seperti yang diharapkan akan terwujud dalam masyarakat yang multikultural dan plural. Selain itu, diskusi kelompok dengan mencampurkan yang berbeda dari segi suku dan etnis hingga agama dalam proses pembelajaran di kelas merupakan metode yang efektif untuk membina hubungan komunikasi yang sehat di antara siswa-siswa. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah ketika akan memulai pelajaran, guru memulai dengan membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik melalui nyanyian lagu-lagu kebangsaan secara bersama-sama.

## 3. Materi.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural di sekolah selaras dengan misi pendidikan kewarganegaraan yakni untuk mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memelihara persatuan dan kesatuan, tidak memaksakan pendapat dan lain-lain, yang dirasionalkan demi terciptanya stabilitas nasional sebagai prasyarat bagi kelangsungan pembangunan. Pendidikan multicultural bukan dimaksudkan untuk menghapus diskriminasi dalam sector pendidikan seperti yang terjadi di Amerika Serikat melainkan sebaliknya bertujuan untuk mempererat dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan sosial yang ada dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberagaman dan pluralitas yang hidup di Indonesia. Menurut Frans Magnis Suseno (2009) pluralism merupakan kesediaan untuk menjunjung tinggi pluralitas, kesediaan untuk menerima kenyataan dalam masyarakat bahwa ada cara hidup, budaya dan keyakinan agama yang berbeda serta kesediaan untuk hidup, bergaul dan bekerja sama serta membangun negara bersama. Tujuan utama penerapan pendekatan pendidikan multikultural di tingkat nasional hendaknya dititikberatkan pada pemahaman dan penghargaan peserta didik terhadap budayanya sendiri dan budaya orang lain, mencakup agama, berlandaskan semboyan bhinneka tunggal ika serta Pancasila. Untuk itu maka diperlukan adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama dengan memasukkan muatan materi keanekaragaman nilai-budaya, didukung oleh penelitian sosiologis dan antropologis untuk pendidikan kemajemukan di Indonesia yang telah mampu hidup berdampingan secara damai merupakan sebuah keunikan yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Menurut Prof Idrus

Affandi (2016) Persoalan serius yang sering menggoda munculnya disintegrasi bangsa adalah soal pemahaman masyarakat tentang toleransi. Dalam banyak kasus toleransi digambarkan sebagai keharusan mayoritas memahami keberadaan minoritas. Memahami akan adanya pluralism sebetulnya masih bisa dipahami sebagai toleransi. Tapi ketika toleransi dipaksakan agar mayoritas tidak melaksanakan hak dan kewajibannya karena demi toleransi terhadap minoritas, cepat atau lambat toleransi seperti ini berubah menjadi kontraproduktif. Berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945 menjadi semakin penting. Sebab keduanya secara historis telah teruji mampu menjembatani berbagai perbedaan, termasuk perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Dinamika sosial adalah kelaziman yang tidak harus dihindari. (mengelola konflik). Kemajemukan tersebut tercipta karena dipersatukan oleh satu *consensus* nasional yakni Pancasila (Widodo et al., 2022). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi panduan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Asmaroini, 2016). Pancasila merupakan bagian integral dari materi pokok yang diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Inilah inti dari pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang Pancasila.

## **Simpulan**

PKn sebagai pendidikan multikultural berperan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman suku bangsa sehingga mampu melahirkan masyarakat yang toleran dan menjunjung persatuan. Adapun model yang ditawarkan Dimana Pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana infiltrasi nilai-nilai keberagaman, terdiri dari strategi (meliputi Kerjasama dengan pihak terkait dinas Pendidikan dan kebudayaan untuk memperkenalkan keberagaman daerah atau melakukan kunjungan eduwisata ke tempat-tempat budaya atau museum), materi, dimana diperlukan adanya penataan ulang dan penguatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), IPS, dan pendidikan agama dengan memasukkan muatan materi keanekaragaman nilai-budaya, serta media pembelajaran yang menyenangkan.

## **Referensi**

### **Buku**

- Alwasilah, A. Chaedar, dkk. (2009). *Etnopedagogi Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan guru*. Bandung: Kiblat.
- Affandi, Idrus. 2016. *Mereformasi Reformasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Affandi, Idrus, *Artikel Dalam Pikiran Rakyat* (terbit tanggal 2 desember 2016)
- Adam, Cindy. 1960. *Biografi Soekarno: Told Story To Cindy Adams*.
- Budimansyah, Dasim, dkk. 2016. *Teori Sosial Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Widia Aksara Press.
- Komalasari, Kokom dan Syaifullah. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia: konsep, perkembangan dan masalah kontemporer*. Bandung: Laboratorium UPI.
- Kalidjernih, Freddy K. 2010. *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal Dan Political*. Bandung: Widia Aksara Press.
- Kalidjernih, Freddy K. 2011. *Puspa Ragam Konsep Dan Isu Kewarganegaraan*. Edisi Ketiga. Bandung: Widia Aksara Press.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasional Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Notonagoro. 1983. *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poespwardjojo, Soerjanto. 1989. *Filsafat Pancasila*. Jakarta. Gramedia.

- Sunarso, Kepentingan Politik Penguasa Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia (Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.).
- Suseno Frans Magnis. 2008. Etika kebangsaan dan etika kemanusiaan. Jakarta: Kanisius.
- Somantri, Numan.1976. Metode Mengajar Civics.Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- Wahab, Abdul Azis dan Sapriya.2011.*Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta.

### **Artikel Jurnal**

- Ahmad Eddison, Hambali, H. (2020). Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Pada Guru Ppkn SMA/SMK Kota Dumai. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 993–1005.
- Alim, S. (2019). Islam , Multikulturalisme , dan Pancasila. *Jurnal Kajian Dakwah Dan Kemasyarakatan*, 23(2), 85–99.
- Aminah, S. (2016). peran pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di indonesia. *Inovasi Dan Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, 04(01), 83–101.
- Arta, I. K. K. (2021). MENGAMALKAN NILAI KEBERSAMAAN DI TENGAH SITUASI PANDEMI COVID-19. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasrawati Denpasar "Integritas Nilai Kebinnekaan Dan Semangat Nasional Dalam Menghadapi Situasi Pandemi Covid 19," 01*, 7–17.
- Asmaroini, A. P. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Bagi Siswa Di Era Globalisasi. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 440. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v4i2.1076>
- Chotimah, U., Aisyah, N., & Meryansumayeka, M. (2020). MEMPERKUAT KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS HOTS PADA PEMBELAJARAN PPKn. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 7(1), 55–67. <https://doi.org/10.36706/jbti.v7i1.11414>
- Fatmi, N., Faradhillah, Rezeki, N. S., & Mukrimah, U. (2023). Implementasi Pendekatan Etnopedagogi Berbasis Kearifan Lokal Terhadap. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 7(1), 64–72.
- Hariyanti. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Guna Membangun Kecerdasan Berideologi Peserta Didik Di Persekolahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 60–68.
- Hariyanti et.al. (2023). Existence of Local Wisdom Based on Pancasila Values Amidst the Dynamics of Global Issues. *Jurnal Etika Demokrasi*, 8(2), 223–233. [https://doi.org/10.26618/jed.v418\(Acec 2019\), 380–385](https://doi.org/10.26618/jed.v418(Acec 2019), 380–385). <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.072>
- Kardiman, Y., Muchtar, S. Al, Abdulkarim, A., & Sapriya. (2020). *Pancasila and Civilized Society*. 418(Acec 2019), 380–385. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.072>
- Khoiri, M., Tiara, M., Ahmad, Z. Bin, Trisno, A., & Rahman, A. (2017). *Puspagram Pendidikan Kewarganegaraan : Di Berbagai Negara*. <http://repository.unp.ac.id/15809/1/PusparagamOK.pdf>
- Muchtar, S. Al, & Iswandi, D. (2018). *The Paradigm of Value Ideology of Pancasila as the Basis of Citizenship Education in the Global Perspective*. 251(Acec), 492–496. <https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.112>
- Muhammad Anas, M. (2019). Internalisasi Nilai Multikultural dalam Mengembangkan Sikap Toleransi (Studi di Pesantren Mahasiswa Universitas Islam Malang). *Nazhruna : Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 164–189.

- Nurhidayah, D., Aisyah, E. S., & Nurjannah, J. (2020). PKn dalam Kurikulum 2013. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 10(1), 1–13.
- Pakpahan, G. K., Salman, I., Setyobekti, A. B., Sumual, I. S., & Christi, A. M. (2021). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mencegah radikalisme. *Kurios*, 7(2), 435–445. <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.351>
- Risdiany, H., & Anggraeni Dewi, D. (2021). Penguatan Karakter Bangsa Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 696–711. <https://doi.org/10.36418/japendi.v2i4.140>
- Sartika, R. (2011). Sosialisasi Politik Dalam Meningkatkan Kecapakan Partisipatoris Pemilih Pemula. *SOSIETAS Jurnal Pendidikan Sosilogi*, 1(1), 1–5.
- Shofa, A. M. A. (2016). Memaknai kembali multikulturalisme Indonesia dalam bingkai pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(1), 34–41. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302>
- Siregar, C. (2014). Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia. *Humaniora*, 5(1), 107. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>
- Sugara, U., & Sugito. (2022). Etnopedagogi: Gagasan dan Peluang Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 93–104. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2888>
- Widodo, B., Al Muchtar, S., & AR, E. D. (2022). Pancasila Literacy to Build Insightful Citizenship Civilization Environment in the Industrial Age 4.0. *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)*, 636(Acec 2021), 46–52. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.009>
- Winarno, W. (2013). PERUBAHAN GLOBAL & PENGUATAN PILAR KEBANGSAAN MELALUI PKn. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 88. <https://doi.org/10.25273/citizenship.v1i2.1100>
- Winataputra, U. S. (2016). Posisi akademik pendidikan kewarganegaraan (PKn) dan muatan/mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks sistem .... *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 1(1), 15–36. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/1184>
- Zuriah, N. (2012). KAJIAN ETNOPELAGOGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI WAHANA PENDIDIKANBUDAYA DAN KARAKTER BANGSA DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH KOTA MALANG. *Jurnal Humanity*, 8(September), 170–185.